

## **BAB II**

### **RIVALITAS AMERIKA SERIKAT DAN CINA**

Amerika Serikat dan Cina memiliki salah satu hubungan bilateral paling penting dan kompleks di dunia. Terjalannya hubungan bilateral Amerika Serikat dan Cina dimulai saat Amerika Serikat mendukung adanya kaum Nasionalis yang melawan invansi pasukan Jepang saat Perang Dunia II. Rivalitas Amerika Serikat dapat dilihat sejak dahulu ketika hadirnya imigran Cina yang datang ke Amerika Serikat dan menimbulkan penolakan-penolakan yang Amerika Serikat berpendapat bahwa imigran Cina adalah ancaman. Puncak dari rivalitas kedua negara diperparah dengan hadirnya pandemi Covid-19 di Amerika Serikat. Adanya pandemi Covid-19 menjadi babak baru atas ketegangan Amerika Serikat dan Cina dengan ditandai hadir kembali kejahatan rasisme masyarakat Cina. Dalam Bab ini, penulis akan membahas mengenai Rasisme pada Masyarakat Asia (Cina) di Amerika Serikat dan Rivalitas Amerika Serikat dan Cina selama Pandemi Covid-19.

#### **2.1 Rasisme pada Masyarakat Asia (Cina) di Amerika Serikat**

Setiap individu berhak untuk hidup. Kalimat tersebut sudah melekat pada doktrin Hak Asasi Manusia, dimana manusia adalah subjek dari moralitas publik politik tentang gagasan bahwa setiap orang adalah subjek perhatian global (Charles R. 2009:147). Singkatnya, manusia sebagai seorang individu menjadi bagian dari masyarakat dunia. Seorang individu ini dikaitkan dengan HAM yang mana manusia merupakan bagian dari latar belakang, budaya, agama dan ideologi mengenai perlindungan dan diakui keberadaan serta nilai-nilai (Brems, Eva. 2001:10).

Di Amerika Serikat membuktikan bahwa HAM ini belum diberlakukan secara merata. Dalam kebijakan luar negerinya, Amerika Serikat tidak selalu menghormati HAM, yang seharusnya pemerintah harus melindungi dan menjaga warga negara sesuai dengan HAM, akan tetapi, pemerintah Amerika Serikat selalu gagal dalam menangani permasalahan HAM. Faktor ekonomi, hukum, pendidikan, dan budaya menjadi faktor dari tidak dipandanginya sebagai suatu hak (Saputri, 2020). Amerika Serikat menjadi negara yang mengawasi pembentukan kebijakan HAM, meskipun Amerika Serikat belum meratifikasi sebagian besar perjanjian HAM.

Rasisme merupakan salah satu bentuk diskriminasi yang bersifat rasial yang ada di Amerika Serikat. Rasisme selalu menjadi topik pembahasan yang serius di PBB. Hal ini dikarenakan, kejahatan rasisme ini bukan kasus yang baru di Amerika Serikat, melainkan kasus lama, laten dan sudah mengakar di lapisan masyarakat, walaupun, Amerika Serikat melarang adanya diskriminasi rasial melalui perjanjian multilateral, pemerintah Amerika Serikat masih membiarkan dan mengizinkan kegiatan ini (Bradley, 2019). Seperti halnya rasisme terhadap masyarakat Asia.

Berbicara mengenai sejarah rasisme terhadap masuknya orang-orang keturunan Asia di Amerika Serikat, diawali dengan budaya dan sejarah perbudakan yang sudah mengakar di Amerika Serikat. Sejarah perbudakan ini sangat identik dengan masyarakat kulit hitam atau Afrika, dimana terdapat hasil dari perbudakan yang menimbulkan perspektif-perspektif dan pandangan yang bersifat rasisme. Adanya pandang tersebut menciptakan sebuah kejahatan rasial terhadap kaum

minoritas seperti masyarakat kulit hitam atau Afrika dan masyarakat keturunan Asia khususnya Cina.

Masuknya orang-orang berketurunan Asia khususnya Cina, dimulai saat terjadinya arus peningkatan imigrasi orang-orang Cina di Amerika Serikat pada tahun 1849. Saat itu, peristiwa *California Gold Rush* membuka peluang banyak pekerjaan (Brockell. 2021). Dimana, permintaan buruh meningkat karena imigran Cina akan bekerja di pertambangan dan konstruksi jalur kereta api, meskipun dengan upah yang sangat minimum dan melakukan pekerjaan yang berbahaya, para imigran Cina menyanggupi pekerjaan tersebut. Pada saat itu, terjadi persebaran opini akan imigran Cina, dimana masyarakat kulit putih merasa bahwa orang Asia datang untuk mencuri pekerjaan masyarakat kulit putih. Persebaran opini ini menimbulkan sentimen anti-Asia dan berlanjut ke ranah pemerintahan.

Hal ini terjadi meliputi keberatan Amerika Serikat terhadap imigrasi Cina yang umumnya karena ketegangan ekonomi dan budaya, serta diskriminasi etnis. Yang mana, imigran Cina menetap pada lingkungan yang mereka buat dan menyebarkan nilai-nilai akan budayanya. Oleh karena itu, terdapat undang-undang dalam mengantisipasi menyebarnya budaya Cina ke dalam lingkungan Amerika Serikat (Office of The Historian, 1866). Beberapa pendukung undang-undang anti-Cina ini berpendapat jika mengakui orang-orang Cina di Amerika Serikat sama saja seperti menurunkan budaya dan moral Amerika Serikat kepada masyarakat Cina. Sehingga terjadi pernyataan rasis secara terang-terangan dari masyarakat Amerika Serikat.

Untuk mengatasi ketegangan sosial ini, Presiden Rutherford B. Hayes memperkenalkan kebijakan yang digunakan untuk membatasi jumlah orang Cina di Amerika Serikat yaitu kebijakan *the Chinese Exclusion Act* pada tahun 1882. Kebijakan ini digunakan untuk menanggukkan imigrasi pekerja Cina untuk jangka waktu 10 tahun (Brockell. 2021). Meskipun sejatinya, imigran Cina sangat memainkan peran penting dalam pembangunan sosial khususnya pada industri garmen. Kebijakan tersebut juga melarang imigran Cina untuk menjadi warga negara Amerika Serikat dan menetapkan rasa takut secara berlebihan akan imigran Cina sebagai ancaman ekonomi, sosial dan keamanan politik.

Kebijakan *the Chinese Exclusion Act* juga menghadirkan hambatan bagi imigrasi perempuan Cina, dimana kebijakan tersebut melarang masuknya pekerja perempuan dan dianggap sebagai pekerja kontrak (Erika Lee 2015:75). Kemudian, imigran perempuan Cina akan bergantung pada suami atau keluarga mereka untuk membantu mereka selama hidup dan tinggal di Amerika. Jika suami atau keluarga mereka meninggal, maka mereka akan kehilangan juga hak untuk tinggal di negara Amerika Serikat. Sehingga pada tahun 1900, imigran perempuan Cina diperbolehkan memasuki Amerika Serikat sebanyak 0,7 persen dari total orang Cina di Amerika Serikat (Erika Lee. 2015:78). Demikian, imigran perempuan Cina tidak dapat memulai imigrasi sendiri tanpa keluarga atau suami mereka.

Kejahatan rasisme kepada imigran Asia kembali terjadi. Pada tahun 1871, terjadi sebuah peristiwa yang menewaskan komunitas kecil Cina di Los Angeles. Peristiwa ini terjadi ketika 500 orang kulit putih dan keturunan Hispanik mengepung dan menyerang komunitas tersebut. Kejadian ini menewaskan korban

setidaknya 17 jiwa (CNN Indonesia, 2021) dan peristiwa tersebut dinamakan *Chinese Massacre of 1871*. Pada saat itu, terdapat sebuah opini bahwa “*500 locals shot, hung, and stabbdeeb innocent Chinese resident.*” (Simoen Man, 2020). Adanya peristiwa tersebut, menimbulkan pemikiran anti-Cina dan sangat berdampak langsung dengan masyarakat Cina dimana kondisi tersebut membuat masyarakat Cina tidak memiliki perlindungan secara hukum.

Ketidakadilan terhadap kaum imigran Cina di Amerika Serikat terus terjadi pada tahun 1885. Peristiwa ini terjadi di Rock Spring, Wyoming Territory, yang pada saat itu, sebanyak 150 warga Amerika Serikat mengepung dan menyerang pekerja tambang Cina dan menewaskan korban jiwa sebanyak 28 orang dan 79 rumah terbakar (CNN Indonesia, 2021). Saat itu, pekerja Cina ditipu dan diberitahu untuk menaiki kereta api menuju tempat aman di San Fransisco, akan tetapi pekerja Cina justru kembali ke tambang (Brockell, 2021). Hal ini membuat Pasukan Tentara Federal Amerika Serikat tinggal di sekitaran pertambangan selama 13 tahun untuk memaksakan ketertiban.

Ketika Amerika Serikat mengalami wabah Pes pertama kali di San Fransisco, seorang pekerja keturunan Cina menjadi kambing hitam yang dilakukan oleh pemerintah Cina. Kala itu, tahun 1900, Presiden William McKinley langsung menyetujui peraturan yang ditujukan untuk mencegah penyebaran penyakit ini (Lawler, 2020). Selanjutnya, gubernur California dari Partai Republik, Henry Gage memberlakukan karantina di Cinatown dengan menggunakan patrol bersenjata yang digunakan untuk menghentikan pergerakan masyarakat Cina. Seperti memisahkan lingkungan antara orang kulit putih dan masyarakat Cina yang

dikurung agar rentan akan penyakit (theSkimm, 2022). Hal ini membuktikan bahwa kaum kulit putih mempunyai kekuasaan yang tinggi dibandingkan kaum ras lainnya.

Tahun 1917, pemberlakuan Undang-Undang mengenai pelarangan zona Asia di Amerika Serikat sudah berlaku bersamaan dengan undang-undang imigrasi. Pada undang-undang ini diperbarui seperti Undang-Undang Pengecualian Cina tahun 1982. Presiden Woodrow Wilson mengesahkan undang-undang tersebut dengan rancangan seperti menaikkan pajak untuk imigran Asia yang sudah berumur dengan memberlakukan tes di atas umur 16 tahun, larangan untuk imigran Asia yang mempunyai penyakit yang berat seperti epilepsi dan tuberculosis dan melarang semua imigran Asia Tenggara dan Timur Tengah memasuki Amerika Serikat (History.com Editors, 2010). Selanjutnya, Presiden Calvin Coolidge menandatangani sebuah sistem kuota yang diberlakukan pada imigran Asia menjadi undang-undang. Dimana undang-undang tersebut menyebutkan bahwa setiap negara akan menerima hingga 2% dari jumlah total setiap kewarganegaraan yang sudah ada di Amerika Serikat (theSkimm, 2022). Undang-undang ini dibuat untuk berupaya menjaga kelompok ras negara yang mayoritas berkulit putih.

Kejahatan rasisme di Amerika Serikat selalu dikaitkan dengan organisasi Ku Klux Klan (KKK). Berakhirnya Perang Vietnam, Amerika Serikat menampung orang-orang asal Vietnam yang melarikan diri dari komunis (Brockell, 2021). Hal ini terjadi di kota Texas dimana orang-orang asal Vietnam dipekerjakan untuk menangkap udang. Akibatnya kembalinya pekerja Asia di Amerika Serikat, menimbulkan sentimen anti-Asia karena mengambil pekerjaan orang kulit putih

(CNN Indonesia, 2021) sehingga organisasi Ku Klux Klan selalu berpatroli di Amerika Serikat dan membakar perahu milik pekerja Vietnam agar tidak dapat bekerja berlayar kembali.

Selanjutnya, perdebatan undang-undang imigrasi Amerika Serikat terlihat karena dorongan dari Gerakan Hak Sipil. Sehingga, pada tahun 1965, Presiden Lyndon B. Johnson menandatangani Undang-Undang Imigrasi dan Kewarganegaraan yang ditujukan untuk menghilangkan undang-undang penghapusan kuota imigran dan menciptakan sistem imigrasi yang lebih manusiawi (theSkimm, 2022). Adanya undang-undang ini seperti mengubah wajah Amerika Serikat. Yang sebelumnya sangat mengetatkan imigran-imigran yang berasal dari Asia, mulai dapat memasuki Amerika Serikat secara leluasa.

Tahun 2001 menjadi tahun yang menyeramkan bagi Amerika Serikat. Dimana terdapat peristiwa serangan terorisme yang kemudian kelompok muslim, seperti Sikh dan Hindu menjadi kambing hitam atas serangan yang dilakukan oleh kelompok Al-Qaida (SAALT, 2019). Adanya peristiwa ini memunculkan persepsi ancaman terhadap teroris khususnya masyarakat Asia Selatan, Muslim, dan Sikh. Hal ini dikatakan bahwa Al-Qaida adalah kelompok muslim yang dalang dari terorisme yang terjadi di Amerika Serikat pada 11 September 2001. Dalam peristiwa ini, terhadap korban jiwa yaitu Balbir Singh Sodhi yang berketurunan Sikh yang dikira oleh pria berkulit putih adalah seorang muslim karena menggunakan sorban dikepalanya.

## **2.1 Rivalitas Amerika Serikat dan Cina selama Pandemi Covid-19**

Menilik pada hubungan internasional, rivalitas antarnegara merupakan hal yang sangat wajar, dimana ketika hubungan internasional secara tidak langsung melibatkan negara-negara di dunia yang bersifat konfliktual, anarki dan kompleksitas, serta aktor suatu negara. Sejatinya, terdapat latar belakang yang menjadikan sebuah negara untuk terus melakukan kegiatan yang menjurus kepada kepentingan domestik dan membuat negara akan terus bertahan dan kuat di tengah era globalisasi yang penuh persaingan (Situmorang, 2020). Oleh karena itu, negara akan terus mempertahankan kedaulatannya dan mengaitkan unsur pertahanan dan keamanan untuk ancaman yang akan dihadapi. Seperti rivalitas antara Amerika Serikat dan Cina yang dikenal sebagai persaingan yang mempunyai kekuatan yang besar. Perdebatan mereka dapat dilihat pada bidang politik, militer dan ekonomi.

Dalam sejarahnya, hubungan Amerika Serikat-Cina selalu ditandai oleh ditandai naik-turunnya kedua negara, kadang dalam kondisi baik, terkadang kondisi hubungan keduanya buruk. Hubungan Amerika Serikat dan Cina tidak serta merta berjalan dengan baik. Pada tahun 1979, sebuah perjanjian hadir dalam hubungan antara negara Amerika Serikat dan Cina dengan saling mengakui satu sama lain dan menciptakan hubungan diplomasi. Kesepakatan ini terjadi untuk mengurangi bahaya konflik internasional (Sukarnaprawira, Aa. 2009:198). Menurut Nixon, Cina memiliki potensi yang besar terutama pada bidang ekonomi, karena perekonomian milik Cina yang terus berkembang pesat. Sehingga, Nixon menggunakan pertemuannya untuk membahas masalah-masalah yang sulit, khususnya Taiwan. Hubungan kerjasama ini tak lepas dari langkah Deng Xiaoping



yang ingin membuka diri terhadap masyarakat Cina untuk menjadi negara yang lebih baik seperti Amerika Serikat. Kesepakatan ini membuat Amerika Serikat dan Cina tumbuh semakin saling bergantung yang ditandai dengan masing-masing merasa nyaman dengan fokus pada keuntungan bersama dari pertukaran ekonomi (Goldstein, 2020).

Hubungan keduanya semakin rumit dan mempunyai potensi akan persaingan di berbagai sektor. Khususnya pada bidang militer, ekonomi dan keamanan. Terutama ketika Amerika Serikat melihat kebangkitan Cina di tatanan dunia internasional. Dimana pertumbuhan ekonomi Cina yang meningkat dengan tinggi yang selaras dengan memainkan peran diplomasi secara aktif (Zhang, 2004: 87-113). Kekuatan Cina seakan menggambarkan bahwa negara akan selalu mendapatkan kekuatan baru seperti kekuatan pertumbuhan ekonomi yang bertumbuh sangat pesat ini. Melansir dalam buku "*The Rise and Fall of the Great Power*" karya Paul Kennedy dimana menyatakan bahwa adanya pergerasan ekonomi ini memunculkan kekuatan besar baru yang suatu hari akan memiliki dampak yang menentukan pada tatanan teritorial atau militer (Kennedy & Luttwak, 1990: 283-289).

Hal ini terlihat pada era pemerintahan Donald Trump, yang mana menimbulkan gejolak dan kontroversi rival dengan Cina. Cina telah dianggap sebagai pesaing jangka panjang oleh Amerika Serikat dan Amerika akan mencegah perluasan pengaruh Cina di dunia (Lippert & Perthes, 2020). Hal ini sangat berkaitan langsung dengan slogan awal kampanye Donald Trump yaitu, "*Make America Great Again*". Slogan tersebut digunakan sebagai langkah untuk

melindungi warga negara Amerika Serikat dan kepentingan nasional. Donald Trump bersama slogan tersebut mengarahkan masalah kebijakan luar negeri Amerika Serikat sebagai unilateralisme atau kebijakan yang lebih mengarah pada isu dalam negeri (Sanjaya, H. 2017). Seperti masalah keamanan nasional yaitu keimigrasian dan terorisme. Sehingga, Donald Trump melakukan kebijakan proteksionisme untuk mencegah perluasan Cina di dunia (CNN Indonesia, 2020).

Sehingga, pada 31 Desember 2019, *World Health Organization* (WHO) mendapatkan informasi mengenai kasus pneumonia yang terjadi di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Selanjutnya 7 Januari 2020, otoritas Cina mengkonfirmasi telah mengidentifikasi virus baru, yaitu virus Corona, yang merupakan famili virus flu, seperti virus SARS dan MERS, yang mana dilaporkan lebih dari 2.000 kasus infeksi virus tersebut terjadi di Cina, termasuk di luar Provinsi Hubei. Virus Corona (CoV) merupakan famili virus yang menyebabkan penyakit mulai dari flu biasa hingga penyakit yang lebih berat seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS-SoV) dan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS-CoV). Pada 11 Februari 2020, World Health Organization mengumumkan nama virus Corona jenis baru tersebut adalah *Corona Virus Disease 2019* (**disingkat menjadi COVID-19**) (Priyatno, A. 2020).

Penyebaran Covid-19 menjadi melebar pada tahun 2020 dan puncaknya pada pertengahan tahun 2021. Covid-19 menjadi persoalan yang serius ketika penyebarannya tidak hanya di Cina namun juga di sejumlah negara di Asia, Amerika, Eropa, Australia, dan Afrika. Pada tahun 2020, WHO (*World Health Organization*) menetapkan bahwa wabah Covid-19 adalah pandemi global (Gloria

Setyvani Putri, 2020). Akibat dari pandemi Covid-19 mengharuskan semua negara di dunia untuk memberlakukan *social-distancing* (menjaga jarak aman, diam, dirumah, bekerja di rumah, bahkan beribadah di rumah), menetapkan *lockdown* selama dua minggu, dan memberhentikan sementara penerbangan domestik maupun luar negeri sebagai cara pencegahan penyebaran Covid-19.

Terhitung sejak tersebarnya virus Covid-19, terdapat kasus positif yang mendera negara-negara besar, di antaranya Amerika Serikat, Spanyol, Italia, Jerman, Indonesia, India dan Brasil (Syawfi, 2022). Ketujuh negara tersebut merupakan negara dengan kasus kematian dan kasus positif yang tinggi Covid-19 di seluruh dunia. Akibatnya, ketujuh negara tersebut mengalami kesulitan dalam mengendalikan pandemi. Seperti halnya, Amerika Serikat yang negara dengan jumlah kasus dan kematian tertinggi akibat Covid-19. Pada April 2020, New York menjadi wilayah bagian Amerika Serikat yang memiliki kasus tertinggi akibat pandemi Covid-19 (BBC.com, 2020). Tercatat dalam kurun waktu 24 jam, hampir 800 orang meninggal akibat virus tersebut.

Ketimpangan sosial ekonomi, ketidaksediaan fasilitas kesehatan dan perpecahan etnis dan ras. Covid-19 seakan menghancurkan hingga ke lapisan masyarakat (Repucci & Slipowitz, 2020). Hal ini menjadikan pandemi Covid-19 sebagai isu transnasional. Dimana, pandemi menjadi isu dasar yang digunakan untuk negara diberbagai perumusan kebijakan luar negeri. Meskipun isu pandemi bersifat *low politic*, pandemi menjadi isu yang bersifat lintas negara karena dalam hubungan internasional, wabah penyakit menjadi salah satu fokus kajian yang melibatkan aktor-aktor di dalam negara, organisasi internasional yang

memberikan peran dalam berkembangnya agenda politik internasional (Stoeva, 2016).

Selanjutnya, pandemi Covid-19 seringkali dikaitkan dengan *proxy war*. *Proxy War* adalah istilah gaya berperang dengan menggunakan sebuah isu yang ditujukan sebagai alat untuk menyudutkan pihak lain, dimana aktor negara maupun non-negara membentuk sebuah kelompok atau aliansi yang digunakan untuk mengemukakan kecamasan dan urgensi dalam merumuskan langkah bersama pada tindakan menyelesaikan kasus secara cepat dan tepat (Sushanti, 2020). Istilah tersebut ditujukan untuk Amerika Serikat ketika Presiden Amerika Serikat, Donald Trump menyalahkan Cina atas terjadinya pandemi Covid-19 (Scottie, 2020).

Kala itu, Cina berusaha menutup-nutupi pemberitaan mengenai Covid-19. Pemerintah Cina seakan-akan menekan dan bergerak lambat dalam merepson kemunculan virus ini. Seperti pada rapat tertutup antara pejabat-pejabat tinggi Cina dan tim medis yang memberikan kesimpulan mengenai virus Corona telah menjadi epidemis (Rangga & Galby Rifqi Samhudi, 2020). Serta pemerintah pusat yang tidak segera mengumumkan akan kedaruratan kesehatan. Hal tersebut dikarenakan, pemerintah Cina enggan diketahui oleh awak media. Dan, diperparah dengan pemerintah Cina lambat untuk melakukan memberitakan kedaruratan kesehatan (Christensen, 2020). Walaupun, virus tersebut sudah mulai terendus oleh media dan menyebar di sejumlah negara.

Saat virus mulai menyebar secara internasional, Donald Trump memberikan pujian kepada Cina sebagai bentuk penanganan pandemi. Akan tetapi, apresiasi ini tidak berlangsung lama. Donald Trump justru menangguhkan wisatawan yang akan

masuk ke Amerika Serikat dan memberikan sikap ketakutan atas pandemi. Amerika Serikat mulai menuduh bahwa Cina tidak bisa mengontrol penanganan Covid-19. Hingga akhirnya, negara itu menjadi negara yang mempunyai jumlah kasus tertinggi di dunia yaitu mencapai angka 25 persen (Scottie, 2020). Tingginya kasus Covid-19 dipicu dengan anggapan Donald Trump cenderung menyepelekan virus Covid-19.

Merebaknya Covid-19 tidak segera ditanggapi oleh Donald Trump dan menganggap tidak penting akan peringatan *World Health Organization* (WHO). Donald Trump seperti sengaja mengabaikan pendapat para ahli yang berujung menganggap bahwa dirinya paling benar. Saat itu, Donald Trump menyatakan bahwa permasalahan atas pandemi hanya bersifat domestik dan menjadi urusan dan tanggung jawab Cina. Setelah virus Covid-19 mulai menyebar di New York, Andrew Cuomo telah memperingatkan Donald Trump untuk membuat kebijakan baru untuk New York (Nainggolan, 2020). Melansir dari pidato sidang PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa), Donald Trump mengatakan bahwa PBB harus meminta pertanggungjawaban Cina atas tindakan mereka (pandemi Covid-19) yang terjadi di seluruh dunia (Scott Neuman, 2020). Donald Trump seakan menyalahkan dan meminta pertanggungjawaban kepada Cina atas penyebaran Covid-19.

Amerika Serikat kembali menuduh Cina atas mengontrol WHO (*World Health Organization*) karena keliru dalam menjelaskan gejala Covid-19. Kemudian, Donald Trump menuntut Cina untuk membayar dana “reparasi” untuk pandemi Covid-19 sebesar US\$10 triliun (Noviana Putri, 2021). Oleh karena itu, Donald Trump menanggukkan aliran dana ke WHO setelah melabeli WHO sebagai

boneka Cina pada saat menangani pandemi Covid-19. Pada saat itu juga, PBB mengumumkan bahwa Amerika Serikat memutuskan untuk keluar dari WHO setelah menjadi anggota selama lebih 70 tahun (Dwina Agustin, 2020). Jika tidak ada perubahan yang signifikan, Donald Trump akan mengubah menjadi penghentian dana secara permanen terhadap penanganan Covid-19 (BBC Indonesia, 2020). Donald Trump merasa bahwa WHO gagal dalam melakukan tugas mereka dan WHO harus bertanggung jawab atas pandemi.

Tak hanya itu, Donald Trump juga mengambil sikap menyebarkan misinformasi cenderung desktruktif terkait Covid-19. Seperti Trump yang menyatakan bahwa obat untuk Covid-19 adalah *Hydroxychloroquine* (Rutledge, 2020). Obat ini adalah obat pencegah anti malaria, kemudian dipromosikan oleh Donald Trump karena ampuh untuk memerangi dan mencegah penyebaran Covid-19. Donald Trump juga menyatakan bahwa disinfektan dapat mengatasi Covid-19 selama satu menit (BBC, 2020).

Dampak dari menyebarnya pandemi Covid-19 ini, terdapat pelampiasan kemarahan dan kebingungan karena pernyataan yang bersifat rasis dan *xenophobia* yang menjadi populer di seluruh penjuru negeri di Amerika Serikat. Hasilnya, masyarakat Asia-Amerika menjadi korban atas diskriminasi dan serangan *xenophobia*. Perilaku dan stigma ini diselaraskan dengan mengacu pada suatu penyakit dengan cara yang sengaja menciptakan bias atas perilaku yang tidak disadari (Vazquez, 2020). Seperti, tuduhan Donald Trump atas penyebutan 'Virus Cina' dan 'Kung Flu' sebagai penyebutan atas Covid-19. Donald Trump dikenal sebagai pemimpin yang memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap politik

dunia, Donald Trump justru kerap melakukan cuitan bersifat agresif dan propaganda melalui akun Twitternya. Sehingga perilaku ini mengacu pada kejahatan rasis yang mana pernyataan atas suatu pemerintah dapat mempengaruhi orang lain. Dengan kata lain, bahasa sangat mempunyai peran penting.

Cuitan tersebut ditujukan untuk Cina sebagai tempat pertama kali Covid-19 ditemukan. Donald Trump menganggap bahwa Covid-19 berasal dari laboratorium Institut Virologi di Wuhan, Cina (Thea Fathana Arbar. 2020). Pada pernyataan tersebut, Trump tidak memberi penjelasan secara rinci dan jelas. Kemudian, Mike Pompeo ikut serta dalam menyalahkan Cina atas pandemi Covid-19. Ketika hadirnya Covid-19 ini Cina dinilai gagal dalam menepati janjinya yaitu menangani kasus Covid-19. Mike Pompeo menyatakan bahwa mempunyai sejarah akan menghadirkan virus Covid-19 (Tracy, 2020). Melalui akun pribadi Twitter miliknya, Mike Pompeo seakan mengingatkan kepada negara-negara untuk meninggalkan WHO. Melansir berita melalui Deccan Herald.com, Mike Pompeo menyebutkan bahwa laporan WHO atas virus Covid-19 adalah palsu (AFP Washington, 2021). Karena laporan tersebut adalah kelanjutan yang palsu dari kampanye disinformasi Cina-WHO. Selama pemerintahan Donald Trump mengisyaratkan bahwa Amerika Serikat mengambil langkah-langkah untuk menghukum Cina atas gagal mencegah virus Covid-19.

Meskipun demikian, peran media sangat berpengaruh akan menyajikan berita dan informasi kepada khayalak umum di suatu negara. Seperti media milik Amerika Serikat yang menunjukkan bahwa menyebarkan propaganda untuk melegitimasi Cina atas pandemi Covid-19. Seperti menyebarkan xenophobia,

menyalahkan Cina atas menutup-nutupi dengan sengaja dan menyebarkan supremasi kulit putih (Foster, 2021). Hal ini membuat Cina semakin terpojokkan akibat tuduhan yang bersifat propaganda tersebut. Akibat dari ini, menyebarkan rasa ketidakpercayaan, membuat bingung masyarakat dengan apa yang harus dipercaya dan apa yang tidak. Sehingga, media propaganda melihat bahwa terdapat ancaman dari luar, hal tersebut sengaja dibuat secara ekstrim untuk memancing kecemasan masyarakat (Andi Youna *et al.*, 2016).

Adanya bias dari media dan politisi pemerintah dalam menyebarkan informasi pandemi Covid-19, memunculkan suatu peristiwa kejahatan rasial yang ditujukan untuk masyarakat Asia-Amerika sebagai korban. Peristiwa ini dinamakan Asian Hate. Asia-Amerika tersebut mengacu pada individu yang memiliki keturunan atau berasal dari Asia Timur, Asia Tenggara dan kontinen India (Perdana, 2020). Peristiwa Asian Hate ditayangkan melalui layar televisi dan video-video yang menayangkan aksi-aksi kekerasan terjadi secara brutal pada target-target yang tidak mengenal usia dan jenis kelamin. Bahkan kejahatan tersebut menimbulkan kematian bagi masyarakat Asia. Peristiwa ini membuktikan bahwa rasisme terhadap masyarakat Asia kembali hadir dan dianggap oleh masyarakat Amerika Serikat bahwa masyarakat Asia adalah ancaman bagi mereka (theSkimm, 2022). Selaras pada peristiwa kejahatan rasial pada tahun 1882 dimana masyarakat Asia adalah sebuah ancaman baginya karena telah mencuri pekerjaan mereka.

Adapun respon dari Cina terkait Donald Trump yang menyalahkan Cina atas pandemi. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Zhao Lijian menyatakan bahwa adanya pandemi bukan dikarenakan Cina, meskipun Cina menjadi negara yang



pertama kali terkontaminasi akan Covid. Melainkan, virus tersebut pertama kali dibawa oleh militer Amerika Serikat ke Cina (Tim, 2020). Cina juga merasa bahwa memberlakukan sikap yang terbuka, transparan dan bertanggung jawab kala pandemi menyerang di seluruh dunia (CNN Indonesia, 2020). Respon tersebut diberikan dikala Donald Trump mengecam Cina dan menyebutnya sebagai pembunuhan massal bagi seluruh dunia. Donald Trump merespon bahwa ketidakmampuan Cina atas Cina menimbulkan pembunuhan massal melalui akun Twitter pribadinya.

Pernyataan rasisme Donald Trump juga berhubungan dengan rivalitas antara Amerika Serikat dan Cina khususnya pada Perang Dagang. Hal ini sejalan dengan kebijakan Donald Trump yang memusuhi Cina, dan bahkan menjadikan ancaman dengan hadirnya kebangkitan Cina di Asia Pasifik. Seperti pernyataan Mike Pompeo, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat yang mengatakan bahwa adanya kebangkitan Cina sangat mengancam pada perekonomian Amerika Serikat dan mengurangi teknologi yang dibagikan oleh Cina (U.S. Embassy Jakarta, 2020). Hal ini juga terlihat pada awal kampanye Donald Trump yang ingin menggoyahkan dan mengecam kebijakan Cina.

## **2.1 Kesimpulan**

Hubungan rivalitas antara Amerika Serikat dan Cina sudah terjadi sejak lama. Dimulai saat imigran Cina masuk ke Amerika Serikat sebagai pekerja pertambangan dan terdapat opini-opini yang menyudutkan imigran Cina yang mana opini tersebut menyatakan bahwa imigran Cina adalah ancaman bagi masyarakat Amerika Serikat karena telah mencuri pekerjaan bagi kaum kulit putih. Kejahatan

rasisme yang ditujukan oleh imigran Cina terus terjadi di setiap pemerintahan kepresidenan seperti Rutherford B. Hayes, William McKinley, Woodrow Wilson, Presiden Lyndon B. Johnson.

Ketika pandemi menyerang negara di seluruh dunia, Amerika Serikat dan Cina menjadi babak baru atas ketegangan yang terjadi. Dimulai saat Cina yang berusaha menutup-nutupi pemberitaan mengenai Covid-19. Kemudian diperparah dengan pemerintah Cina untuk melakukan memberitakan kedaruratan kesehatan dan pernyataan bersifat rasis dan terkesan xenophobia kembali hadir di era pemerintahan Donald Trump. Yang mana pernyataan tersebut dilontarkan sebagai atas penyebutan Covid-19 yaitu “Kungflu Cina” dan “Virus Cina”. Hal ini terjadi sebagai respon bahwa pandemi Covid-19 adalah tanggung jawab Cina dan tidak bisa mengontrol pandemi Covid-19.